

**LAPORAN STUDI KELAYAKAN
PT LINK NET Tbk**

RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

31 DESEMBER 2025



Kusnanto & rekan

Independent Business Appraisers

License : 2.19.0162
Indonesia

No. : 00066/2.0162-00/BS/06/0153/1/IV/2026

17 April 2026

Kepada Yth.

PT LINK NET Tbk
Centennial Tower Lt. 26 Unit D
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 24 – 25
Jakarta Selatan 12930

U.p. : Direksi

Hal : Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Dengan hormat,

PT Link Net Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") merencanakan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha atas beberapa bidang usaha (selanjutnya disebut "**Rencana Penambahan Kegiatan Usaha**") dengan rincian sebagai berikut:

No	KBLI	Keterangan
1	KBLI 43213	Pemasangan Sistem Elektronika
2	KBLI 43299	Pemasangan Konstruksi Lainnya YTDL
3	KBLI 46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
4	KBLI 46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya YTDL
5	KBLI 58290	Penerbitan Perangkat Lunak (Software) Lainnya
6	KBLI 62201	Aktivitas Konsultasi dan Manajemen Keamanan Siber
7	KBLI 62202	Aktivitas Penyediaan dan Pengelolaan Identitas Digital
8	KBLI 62203	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Jasa Terkait
9	KBLI 62204	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things</i> (IOT)
10	KBLI 63101	Aktivitas Pengolahan Data
11	KBLI 63102	Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting, dan Aktivitas Terkait
12	KBLI 63900	Aktivitas Jasa Portal Pencarian Web Dan Informasi Lainnya
13	KBLI 71101	Aktivitas Arsitektural
14	KBLI 80190	Aktivitas Keamanan YTDL
15	KBLI 46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, manajemen Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut "**KJPP**") Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut "**KR**" atau "**kami**") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan surat penawaran kami No. KR/260316-002 tanggal 16 Maret 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), menyampaikan kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyediaan jasa telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (penyedia jasa internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya dan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), juga untuk perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call center*. Perseroan berdomisili di Centennial Tower Lantai 26 Unit D, Jalan. Jend. Gatot Subroto, Kavling 24 – 25, Jakarta Selatan 12930, dengan nomor telepon: (021) 527 8811 dan *email*: corporate.secretary@linknet.co.id.

Teknologi informasi merupakan sektor yang berkembang pesat dan berperan penting dalam mendukung aktivitas berbagai industri. Perkembangan tersebut mencakup infrastruktur, jaringan optimal, pusat data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang terintegrasi. Dalam proses pengadaan aktivitas teknologi informasi, dinamika ketersediaan perangkat dan suku cadang serta konstruksi sistem yang terstruktur untuk menghasilkan solusi efisien dan berkelanjutan menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis. Selain itu, aspek keamanan menjadi pertimbangan penting dalam melindungi data dari ancaman siber yang didukung kemampuan komputasi canggih untuk mengolah data secara cepat dan akurat serta meningkatkan produktivitas dan inovasi.

Menanggapi hal tersebut, Perseroan sebagai penyedia jasa teknologi informasi telah merancang berbagai rencana strategis jangka panjang yang mencakup optimalisasi portofolio dan penguatan secara infrastruktur fisik ataupun digital. Sebagai kelanjutan dari strategi tersebut, dalam mendukung pengembangan informasi teknologi Perseroan, terus merealisasikan pengadaan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perseroan memandang bahwa Perseroan dapat membentuk ekosistem informasi teknologi yang solid dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik serta berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Perseroan.

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan salah satu langkah strategis dan penting bagi pengembangan serta keberlanjutan usaha Perseroan yang bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru serta meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut tetap berada dalam koridor kegiatan usaha utama Perseroan dan tidak mengubah karakteristik, pola bisnis, maupun model pengelolaan Perseroan. Selain itu, dengan melakukan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan dapat memenuhi potensi permintaan pasar, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan daya saing melalui diversifikasi produk dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri.



Rencana Penambahan Kegiatan Usaha pada prinsipnya mencakup penambahan KBLI yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh unit usaha Perseroan. Dengan adanya bidang usaha penunjang tersebut, Perseroan akan memiliki dasar legalitas yang lebih memadai untuk mengoptimalkan potensi usaha dan memperoleh kontribusi tambahan terhadap pendapatan Perseroan. Selanjutnya, bidang usaha yang akan ditambahkan memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan serta didukung oleh potensi permintaan pasar yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan meyakini bahwa penambahan kegiatan usaha ini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan.

Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan meyakini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha diyakini tidak akan mengakibatkan perubahan terhadap pola bisnis maupun model pengelolaan Perseroan, mengingat pelaksanaannya tetap mengacu pada struktur organisasi, sistem pengelolaan, serta kebijakan operasional yang telah berlaku. Dengan demikian, kegiatan usaha yang ditambahkan dapat diintegrasikan secara efektif dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, juga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif terhadap penciptaan nilai jangka panjang serta peningkatan profitabilitas kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan salah satu langkah strategis dan penting bagi pengembangan serta keberlanjutan usaha Perseroan yang bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru serta meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut tetap berada dalam koridor kegiatan usaha utama Perseroan dan tidak mengubah karakteristik, pola bisnis, maupun model pengelolaan Perseroan. Selain itu, dengan melakukan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan dapat memenuhi potensi permintaan pasar, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan daya saing melalui diversifikasi produk dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri.
- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha pada prinsipnya mencakup penambahan KBLI yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh unit usaha Perseroan. Dengan adanya bidang usaha penunjang tersebut, Perseroan akan memiliki dasar legalitas yang lebih memadai untuk mengoptimalkan potensi usaha dan memperoleh kontribusi tambahan terhadap pendapatan Perseroan. Selanjutnya, bidang usaha yang akan ditambahkan memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan serta didukung oleh potensi permintaan pasar yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan meyakini bahwa penambahan kegiatan usaha ini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan.



- Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan meyakini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha diyakini tidak akan mengakibatkan perubahan terhadap pola bisnis maupun model pengelolaan Perseroan, mengingat pelaksanaannya tetap mengacu pada struktur organisasi, sistem pengelolaan, serta kebijakan operasional yang telah berlaku. Dengan demikian, kegiatan usaha yang ditambahkan dapat diintegrasikan secara efektif dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, juga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif terhadap penciptaan nilai jangka panjang serta peningkatan profitabilitas kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut bukan merupakan transaksi material, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (selanjutnya disebut “**POJK 17/2020**”). Namun demikian, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan perubahan kegiatan usaha sehingga Perseroan harus memenuhi POJK 17/2020.

Untuk penambahan kegiatan usaha, POJK 17/2020 mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas transaksi tersebut, yang disiapkan oleh penilai independen.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, maka Perseroan menunjuk penilai independen, KR untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha (selanjutnya disebut “**Laporan Studi Kelayakan**”) atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Laporan Studi Kelayakan ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



TUJUAN DAN MAKSUD PENUGASAN

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan (selanjutnya disebut "**Objek Penilaian**") sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

Studi Kelayakan ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (selanjutnya disebut "**SPI**").

TANGGAL STUDI KELAYAKAN

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

JENIS LAPORAN

Jenis laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini merupakan laporan terinci.



KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL STUDI KELAYAKAN (*SUBSEQUENT EVENT*)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, dari tanggal studi kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2025, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal studi kelayakan (*subsequent event*) yang secara signifikan dapat memengaruhi kesimpulan studi kelayakan.

DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Dalam melakukan penugasan ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**KAP**") Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (selanjutnya disebut "**RJRR**") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00039/2.1457/AU.1/06/0239-3/1/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
3. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP RJRR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00035/2.1457/AU.1/06/0239-2/1/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (selanjutnya disebut "**TWRR**") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00038/2.1025/AU.1/06/0239-2/1/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
5. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (selanjutnya disebut "**PSS**") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00186/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
6. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP PSS sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00325/2.1032/AU.1/06/1294-2/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;



7. Proyeksi laporan keuangan Perseroan terkait Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
8. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 13 tanggal 19 Juli 2021 oleh Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta terkait perubahan anggaran dasar;
9. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha;
10. Tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku umum, yaitu sebesar 22,00% untuk tahun 2026 – 2030;
11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan;
12. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
13. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
14. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
15. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha; dan
16. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut.



Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Perseroan. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan hanya merupakan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan Perseroan.

KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.



Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI

Dalam menyusun laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR diberikan kesempatan untuk melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan Laporan Studi Kelayakan.



INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh analisis yang dihasilkan dari proses studi kelayakan ini dan KR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran kami No. KR/260316-002 tanggal 16 Maret 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

METODE YANG DIGUNAKAN

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan perhitungan nilai kini atas proyeksi laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan.

Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030:

Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah)				
	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Pendapatan	100.463	108.500	115.010	120.761	126.799
Beban pokok pendapatan	74.536	78.142	82.830	86.276	90.534
Laba kotor	25.928	30.359	32.180	34.485	36.265
Beban Usaha	17.694	18.579	19.508	20.483	21.507
Laba usaha	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	-	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Beban pajak	(1.811)	(2.592)	(2.788)	(3.080)	(3.247)
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511

Berdasarkan analisis tersebut di atas, proyeksi jumlah laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebesar Rp 47,93 miliar.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.



Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 10,70%.

Dengan demikian, Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511
Faktor diskonto	0,9505	0,8587	0,7757	0,7007	0,6330
Nilai kini	6.104	7.890	7.667	7.653	7.287
Jumlah nilai kini	36.601				

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan memengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.



DISTRIBUSI LAPORAN STUDI KELAYAKAN

Laporan Studi Kelayakan ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain atau untuk kepentingan lain. Laporan Studi Kelayakan ini tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitannya dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Laporan Studi Kelayakan ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Laporan Studi Kelayakan kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan (*corporate seal*) dari KJPP Kusnanto & rekan.

Hormat kami,
KJPP KUSNANTO & REKAN



Willy D. Kusnanto
Pimpinan Rekan

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996





ASUMSI DAN SYARAT PEMBATAS

1. KR sama sekali tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap Perseroan untuk sekarang dan masa yang akan datang.
2. Biaya untuk studi kelayakan ini tidak tergantung pada besarnya kesimpulan yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan.
3. Kesimpulan dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
4. Laporan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan, serta ditujukan terbatas kepada klien dimaksud.
5. Baik seluruh maupun sebagian dari isi laporan ini tidak diizinkan untuk dipublikasikan melalui iklan atau media lainnya tanpa seizin dari **KJPP Kusnanto & rekan**.
6. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan KR dan stempel perusahaan (*corporate seal*) dari **KJPP Kusnanto & rekan**.



PERNYATAAN INDEPENDENSI PENILAI

1. KR tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan perusahaan yang diuji kelayakannya.
2. KR tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi terkait dengan usaha/saham perusahaan yang diuji kelayakannya.
3. KR tidak memiliki pinjaman dengan perusahaan yang diuji kelayakannya.
4. Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun.
5. KR hanya menerima imbalan jasa sesuai dengan surat penugasan KR.

Tim Penilai:

Willy D. Kusnanto

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996



Erric Reynaldi

No. MAPPI : 13-P-04625



Kurnia Nugraha Chahyana

No. MAPPI : 20-P-10335



Bernhard Wilfridus

No. MAPPI : 25-A-13537





SURAT PERNYATAAN

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Pernyataan dalam laporan ini, yang menjadi dasar dari analisis, pendapat, dan kesimpulan yang diuraikan di dalamnya adalah benar. Laporan ini menjelaskan semua syarat-syarat pembatasan yang memengaruhi analisis, pendapat, dan kesimpulan yang tertera dalam laporan ini dan laporan ini telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” dan Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (SPI) serta telah dibuat dengan memenuhi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
2. KR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan.
3. Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam laporan adalah benar adanya dan sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik KR.
4. Penugasan studi kelayakan profesional telah dilakukan terhadap Objek Penilaian pada tanggal studi kelayakan yang ditentukan, yaitu 31 Desember 2025.
5. Penugasan studi kelayakan profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan.
7. Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan nilai.
8. KR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
9. KR telah memenuhi pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
10. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan.
11. KR telah memiliki pemahaman mengenai Objek Penilaian yang diuji kelayakannya.
12. Imbalan jasa yang diterima oleh Penilai tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan dari proses analisis Objek Penilaian.
13. Analisis dan kesimpulan nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas.



14. Data ekonomi dan industri dalam Laporan Studi Kelayakan ini diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini KR dapat dipertanggungjawabkan.
15. Tidak seorangpun selain yang disebutkan dalam Laporan Studi Kelayakan ini telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Studi Kelayakan ini.
16. KR telah melakukan inspeksi dan wawancara dengan manajemen Perseroan terkait dengan operasional, kinerja, dan prospek dari Perseroan.

Tim Penilai:

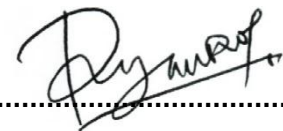
Willy D. Kusnanto

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996


.....

Erric Reynaldi

No. MAPPI : 13-P-04625


.....

Kurnia Nugraha Chahyana

No. MAPPI : 20-P-10335


.....

Bernhard Wilfridus

No. MAPPI : 25-A-13537


.....



DAFTAR ISI

	HALAMAN
OPINI	i
ASUMSI DAN SYARAT PEMBATAS	xiii
PERNYATAAN INDEPENDENSI PENILAI	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
I. RINGKASAN EKSEKUTIF	
A. Alasan dan Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Maksud Penugasan	5
C. Data dan Informasi yang Digunakan	5
D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok	7
E. Tingkat Kedalaman Investigasi	9
F. Kejadian Penting Setelah Tanggal Studi Kelayakan (<i>Subsequent Event</i>)	9
G. Independensi Penilai	9
H. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Studi Kelayakan	9
I. Metode yang Digunakan	10
J. Analisis Kelayakan	10
K. Kesimpulan	11
II. ASPEK HUKUM	
A. PT Link Net Tbk	12
III. ASPEK KELAYAKAN PASAR	
A. Tinjauan Industri Teknologi Informasi di Dunia	14
B. Tinjauan Industri Teknologi Informasi di Indonesia	18
C. Strategi Pemasaran	20
D. Pesaing Usaha	21



HALAMAN

IV. ASPEK KELAYAKAN TEKNIS	
A. Gambaran Umum Wilayah Operasional PT Link Net Tbk	22
B. Proses Operasional PT Link Net Tbk	22
C. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya	23
V. ASPEK KELAYAKAN POLA BISNIS	
A. Keunggulan Kompetitif	25
B. Aktivitas Perseroan Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha	26
VI. ASPEK KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN	
A. Kapasitas dan Kemampuan Manajemen	27
B. Ketersediaan Tenaga Kerja	28
C. Risiko Usaha	28
VII. ASPEK KELAYAKAN KEUANGAN	
A. Proyeksi Perseroan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha	30
B. Tingkat Diskonto	34
C. Analisis Kelayakan	38
VIII. KESIMPULAN	39



DAFTAR TABEL

	HALAMAN	
Tabel 1	Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Link Net Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030	10
Tabel 2	Proyeksi Nilai Kini Laba Tahun Berjalan Setelah Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Link Net Tbk Per 31 Desember 2026 – 2030	11
Tabel 3	Daftar Kepemilikan dan Struktur Pemegang Saham PT Link Net Tbk	13
Tabel 4	Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Link Net Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030	33
Tabel 5	Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Link Net Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030	34
Tabel 6	Proyeksi Nilai Kini Laba Tahun Berjalan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Link Net Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030	37
Tabel 7	Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Link Net Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030	38
Tabel 8	Proyeksi Nilai Kini Laba Tahun Berjalan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Link Net Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030	38



DAFTAR GRAFIK

	HALAMAN
Grafik 1 Belanja IT Global Tahun 2025 dan 2026	15
Grafik 2 Proyeksi Pendapatan PT Link Net Tbk Tahun 2026 – 2030	31
Grafik 3 Proyeksi Pokok Pedapatan PT Link Net Tbk Tahun 2026 – 2030	32



DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran A	40



I. RINGKASAN EKSEKUTIF

I.A. Alasan dan Latar Belakang

PT Link Net Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) merupakan suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyediaan jasa telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (penyedia jasa internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya dan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), juga untuk perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call center*. Perseroan berdomisili di Centennial Tower Lantai 26 Unit D, Jalan. Jend. Gatot Subroto, Kavling 24 – 25, Jakarta Selatan 12930, dengan nomor telepon: (021) 527 8811 dan *email*: corporate.secretary@linknet.co.id.

Teknologi informasi merupakan sektor yang berkembang pesat dan berperan penting dalam mendukung aktivitas berbagai industri. Perkembangan tersebut mencakup infrastruktur, jaringan optimal, pusat data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang terintegrasi. Dalam proses pengadaan aktivitas teknologi informasi, dinamika ketersediaan perangkat dan suku cadang serta konstruksi sistem yang terstruktur untuk menghasilkan solusi efisien dan berkelanjutan menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis. Selain itu, aspek keamanan menjadi pertimbangan penting dalam melindungi data dari ancaman siber yang didukung kemampuan komputasi canggih untuk mengolah data secara cepat dan akurat serta meningkatkan produktivitas dan inovasi.



Menanggapi hal tersebut, Perseroan sebagai penyedia jasa teknologi informasi telah merancang berbagai rencana strategis jangka panjang yang mencakup optimalisasi portofolio dan penguatan secara infrastruktur fisik ataupun digital. Sebagai kelanjutan dari strategi tersebut, dalam mendukung pengembangan informasi teknologi Perseroan, terus merealisasikan pengadaan dengan merencanakan untuk melakukan kegiatan usaha atas beberapa bidang usaha (selanjutnya disebut “**Rencana Penambahan Kegiatan Usaha**”) dengan rincian sebagai berikut:

No	KBLI	Keterangan
1	KBLI 43213	Pemasangan Sistem Elektronika
2	KBLI 43299	Pemasangan Konstruksi Lainnya YTDL
3	KBLI 46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
4	KBLI 46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya YTDL
5	KBLI 58290	Penerbitan Perangkat Lunak (Software) Lainnya
6	KBLI 62201	Aktivitas Konsultasi dan Manajemen Keamanan Siber
7	KBLI 62202	Aktivitas Penyediaan dan Pengelolaan Identitas Digital
8	KBLI 62203	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Jasa Terkait
9	KBLI 62204	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things</i> (IOT)
10	KBLI 63101	Aktivitas Pengolahan Data
11	KBLI 63102	Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting, dan Aktivitas Terkait
12	KBLI 63900	Aktivitas Jasa Portal Pencarian Web Dan Informasi Lainnya
13	KBLI 71101	Aktivitas Arsitektural
14	KBLI 80190	Aktivitas Keamanan YTDL
15	KBLI 46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik

Perseroan memandang bahwa Perseroan dapat membentuk ekosistem informasi teknologi yang solid dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik serta berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Perseroan.

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan salah satu langkah strategis dan penting bagi pengembangan serta keberlanjutan usaha Perseroan yang bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru serta meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut tetap berada dalam koridor kegiatan usaha utama Perseroan dan tidak mengubah karakteristik, pola bisnis, maupun model pengelolaan Perseroan. Selain itu, dengan melakukan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan dapat memenuhi potensi permintaan pasar, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan daya saing melalui diversifikasi produk dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri.



Rencana Penambahan Kegiatan Usaha pada prinsipnya mencakup penambahan KBLI yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh unit usaha Perseroan. Dengan adanya bidang usaha penunjang tersebut, Perseroan akan memiliki dasar legalitas yang lebih memadai untuk mengoptimalkan potensi usaha dan memperoleh kontribusi tambahan terhadap pendapatan Perseroan. Selanjutnya, bidang usaha yang akan ditambahkan memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan serta didukung oleh potensi permintaan pasar yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan meyakini bahwa penambahan kegiatan usaha ini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan.

Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan meyakini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha diyakini tidak akan mengakibatkan perubahan terhadap pola bisnis maupun model pengelolaan Perseroan, mengingat pelaksanaannya tetap mengacu pada struktur organisasi, sistem pengelolaan, serta kebijakan operasional yang telah berlaku. Dengan demikian, kegiatan usaha yang ditambahkan dapat diintegrasikan secara efektif dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, juga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif terhadap penciptaan nilai jangka panjang serta peningkatan profitabilitas kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan salah satu langkah strategis dan penting bagi pengembangan serta keberlanjutan usaha Perseroan yang bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru serta meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut tetap berada dalam koridor kegiatan usaha utama Perseroan dan tidak mengubah karakteristik, pola bisnis, maupun model pengelolaan Perseroan. Selain itu, dengan melakukan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan dapat memenuhi potensi permintaan pasar, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan daya saing melalui diversifikasi produk dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri.



- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha pada prinsipnya mencakup penambahan KBLI yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh unit usaha Perseroan. Dengan adanya bidang usaha penunjang tersebut, Perseroan akan memiliki dasar legalitas yang lebih memadai untuk mengoptimalkan potensi usaha dan memperoleh kontribusi tambahan terhadap pendapatan Perseroan. Selanjutnya, bidang usaha yang akan ditambahkan memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan serta didukung oleh potensi permintaan pasar yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan meyakini bahwa penambahan kegiatan usaha ini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan.
- Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan meyakini dapat membuka peluang pertumbuhan usaha tanpa mengubah fokus dan segmen pasar utama Perseroan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha diyakini tidak akan mengakibatkan perubahan terhadap pola bisnis maupun model pengelolaan Perseroan, mengingat pelaksanaannya tetap mengacu pada struktur organisasi, sistem pengelolaan, serta kebijakan operasional yang telah berlaku. Dengan demikian, kegiatan usaha yang ditambahkan dapat diintegrasikan secara efektif dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, juga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif terhadap penciptaan nilai jangka panjang serta peningkatan profitabilitas kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut bukan merupakan transaksi material, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (selanjutnya disebut “**POJK 17/2020**”). Namun demikian, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan perubahan kegiatan usaha sehingga Perseroan harus memenuhi POJK 17/2020.

Untuk penambahan kegiatan usaha, POJK 17/2020 mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas transaksi tersebut, yang disiapkan oleh penilai independen.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, maka Perseroan menunjuk penilai independen, Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “**KJPP**”) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “**KR**” atau “**kami**”) untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha (selanjutnya disebut “**Laporan Studi Kelayakan**”) atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Laporan Studi Kelayakan ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

I.B. Tujuan dan Maksud Penugasan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan (selanjutnya disebut "**Objek Penilaian**") sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

Studi Kelayakan ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (selanjutnya disebut "**SPI**").

I.C. Data dan Informasi yang Digunakan

Dalam melakukan penugasan ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**KAP**") Rintis, Jumadi, Riando, dan Rekan (selanjutnya disebut "**RJRR**") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00039/2.1457/AU.1/06/0239-3/1/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;



3. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP RJRR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00035/2.1457/AU.1/06/0239-2/1/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (selanjutnya disebut "TWRR") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00038/2.1025/AU.1/06/0239-2/1/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
5. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (selanjutnya disebut "PSS") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00186/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
6. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP PSS sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00325/2.1032/AU.1/06/1294-2/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
7. Proyeksi laporan keuangan Perseroan terkait Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
8. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 13 tanggal 19 Juli 2021 oleh Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta terkait perubahan anggaran dasar;
9. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha;
10. Tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku umum, yaitu sebesar 22,00% untuk tahun 2026 – 2030;
11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan;
12. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;



13. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
14. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
15. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha; dan
16. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan.

I.D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.



I.E. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam menyusun laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR diberikan kesempatan untuk melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan Laporan Studi Kelayakan.

I.F. Kejadian Penting Setelah Tanggal Studi Kelayakan (*Subsequent Event*)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, dari tanggal studi kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2025, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal studi kelayakan (*subsequent event*) yang secara signifikan dapat memengaruhi kesimpulan studi kelayakan.

I.G. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh analisis yang dihasilkan dari proses studi kelayakan ini dan KR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran kami No. KR/260316-002 tanggal 16 Maret 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

I.H. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Studi Kelayakan

Dalam evaluasi studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



I.I. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan perhitungan nilai kini atas proyeksi laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan.

I.J. Analisis Kelayakan

Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030:

Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Tabel 1
PT Link Net Tbk
Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 - 2030

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah)				
	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Pendapatan	100.463	108.500	115.010	120.761	126.799
Beban pokok pendapatan	74.536	78.142	82.830	86.276	90.534
Laba kotor	25.928	30.359	32.180	34.485	36.265
Beban Usaha	17.694	18.579	19.508	20.483	21.507
Laba usaha	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	-	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Beban pajak	(1.811)	(2.592)	(2.788)	(3.080)	(3.247)
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511

Berdasarkan analisis tersebut di atas, proyeksi jumlah laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebesar Rp 47,93 miliar.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 10,70%.



Dengan demikian, Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
PT Link Net Tbk
Proyeksi Nilai Kini Laba Tahun Berjalan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Per 31 Desember 2026 - 2030

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511
Faktor diskonto	0,9505	0,8587	0,7757	0,7007	0,6330
Nilai kini	6.104	7.890	7.667	7.653	7.287
Jumlah nilai kini	<u>36.601</u>				

I.K. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan memengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.



II. ASPEK HUKUM

II.A. PT Link Net Tbk

II.A.1. Latar Belakang

Perseroan didirikan dengan nama PT Seruling Indah Permai berdasarkan Akta Notaris No. 93 tanggal 14 Maret 1996 dari Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris No. 304 tanggal 26 Juli 1996 dari Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8324.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 96 tanggal 29 November 1996, Tambahan No. 9456. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Link Net berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 28 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dalam Surat Keputusan No. C-9118 HT.01.04.TH.2000 tanggal 20 April 2000.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 13 tanggal 19 Juli 2021 oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429788 tanggal 19 Juli 2021.

Perusahaan selanjutnya mengubah alamat perusahaan menjadi Centennial Tower Lantai 26 Unit D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta Selatan 12930 berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 11 Oktober 2021 oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH. 01.030459106 tanggal 11 Oktober 2021

Kantor pusat Perseroan beralamat di Centennial Tower Lantai 26 Unit D, Jalan. Jend. Gatot Subroto Kavling. 24-25 Jakarta Selatan 12930.



II.A.2. Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Vivek Sood
Komisaris Independen	:	Alexander S. Rusli
Komisaris Independen	:	Thandalam Veeravalli Thirumala Chari
Komisaris	:	Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil
Komisaris	:	Thomas Hundt

Direksi

Presiden Direktur	:	Kanishka Gayan Wickrama
Direktur	:	Yosafat Marhasak Hutagalung

II.A.3. Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham Perseroan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
PT Link Net Tbk
Daftar Kepemilikan dan Struktur Pemegang Saham

(Dalam Rupiah)			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	1.986.525.127	72,19%	198.652.831.479
XLSMART	550.316.196	20,00%	55.031.707.910
Masyarakat/Public	215.064.261	7,82%	21.506.460.611
Jumlah	2.751.905.584	100,00%	275.191.000.000

II.A.4 Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyediaan jasa telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (penyedia jasa internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya dan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), juga untuk perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call center*.



III. ASPEK KELAYAKAN PASAR

III.A. Tinjauan Industri Teknologi Informasi di Dunia

Teknologi informasi (*Information Technology/IT*) merupakan sektor bisnis yang berhubungan dengan proses komputasi yang di dalamnya termasuk perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), telekomunikasi, dan secara umum meliputi pengiriman informasi atau sistem yang memfasilitasi komunikasi. Perkembangan IT telah mendorong terciptanya sistem baru dalam berbagai kegiatan bisnis, sehingga mendukung efisiensi operasional bisnis. Tingginya kebutuhan perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia juga berperan aktif dalam menciptakan peluang baru pada bidang teknologi digital yang melibatkan seluruh negara-negara di dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya peran industri IT dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu, hampir diseluruh negara selalu memberikan prioritas pada industri IT sebagai salah satu aspek pembangunan negara.

Prioritas terhadap industri teknologi informasi juga tercermin dari tingginya penggunaan internet melalui perangkat seluler di berbagai negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Exploding Topics, pada tahun 2025, lebih dari 64,00% lalu lintas situs web di dunia berasal dari perangkat seluler. Selain itu, sekitar 96,30% pengguna internet mengakses jaringan internet menggunakan telepon genggam, dengan jumlah pengguna internet seluler aktif diperkirakan mencapai sekitar 4,32 miliar orang. Secara regional, Afrika tercatat sebagai kawasan dengan proporsi lalu lintas internet dari perangkat seluler tertinggi di dunia, yaitu sebesar 69,13%. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan perangkat seluler, perkembangan teknologi jaringan juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, di mana jumlah koneksi jaringan 5G di seluruh dunia diperkirakan akan melampaui 1 miliar koneksi pada tahun 2025.

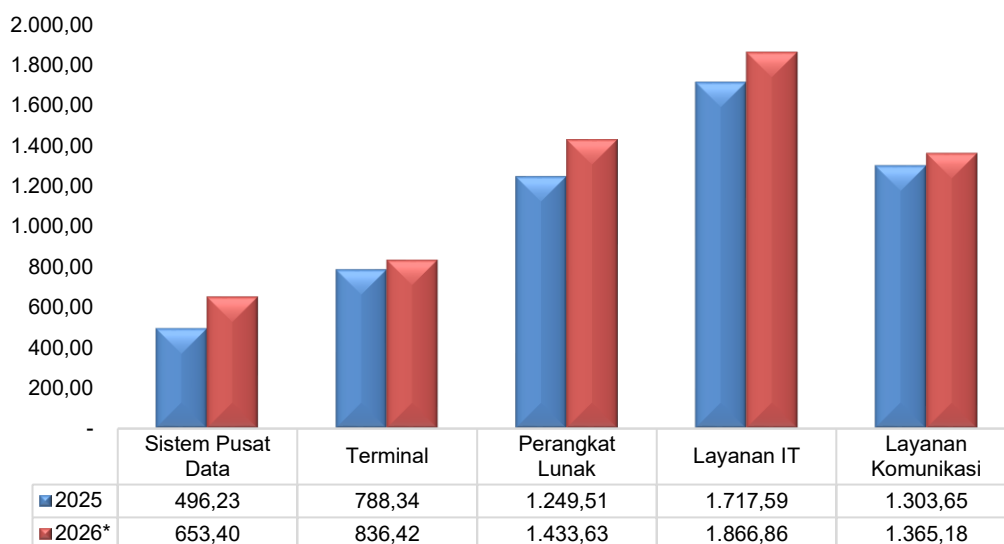
Pertumbuhan sektor teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan *hardware* yang mendukung ekosistem digital secara keseluruhan. Perangkat keras seperti server, komputer pribadi, *smartphone*, serta perangkat *Internet of Things* (IoT) menjadi fondasi utama bagi perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan semakin kompleksnya aplikasi dan layanan digital, kebutuhan akan perangkat dengan kinerja yang lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih efisien cenderung terus meningkat. Selain itu, perangkat keras juga dituntut untuk mampu mendukung kemajuan konektivitas berkecepatan tinggi, termasuk teknologi jaringan 5G. Perangkat yang kompatibel dengan jaringan tersebut memungkinkan akses internet yang lebih stabil dan cepat, sehingga memberikan dampak signifikan bagi berbagai sektor, antara lain pendidikan, layanan kesehatan, dan manufaktur. Oleh karena itu, inovasi yang berkelanjutan di sektor perangkat keras menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan teknologi informasi agar dapat mencapai potensi yang optimal. Secara umum, perangkat keras berperan sebagai sarana pendukung dalam implementasi berbagai perangkat lunak dan sistem digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta menciptakan peluang baru yang dapat mengubah dinamika pasar global.



Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perangkat keras dalam mendukung perkembangan ekosistem digital, ukuran pasar perangkat keras teknologi informasi global juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Berdasarkan laporan dari *Research and Markets*, nilai pasar IT *hardware* global pada tahun 2025 mencapai USD 141,15 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 206,05 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) sebesar 7,86% selama periode 2025 – 2030. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan infrastruktur pusat data, perkembangan komputasi awan, pertumbuhan penggunaan perangkat seluler, serta semakin luasnya penerapan teknologi digital di berbagai sektor industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat keras tetap menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan industri teknologi informasi di tingkat global.

Berkaitan dengan hal tersebut, penjualan perangkat lunak teknologi informasi diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya adopsi digitalisasi di berbagai sektor industri, yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan perangkat lunak untuk mendukung analitik data, otomatisasi proses bisnis, serta solusi keamanan siber guna meningkatkan efisiensi operasional dan melindungi data dalam lingkungan digital. Peningkatan kebutuhan tersebut juga tercermin pada proyeksi belanja teknologi informasi global yang menunjukkan tren pertumbuhan pada berbagai segmen utama, meliputi sistem pusat data, perangkat, perangkat lunak, layanan teknologi informasi, dan layanan komunikasi.

Grafik 1
Belanja IT Global Tahun 2025 dan 2026
(Dalam juta USD)



Sumber: Gartner

*) Proyeksi



Berdasarkan laporan dari Gartner, belanja IT global diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025 pada seluruh segmen utama. Belanja pada segmen sistem pusat data meningkat dari USD 496,23 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 653,40 miliar pada tahun 2026. Pada segmen terminal/perangkat, belanja diproyeksikan naik dari USD 788,34 miliar menjadi USD 836,42 miliar, sedangkan pada segmen perangkat lunak meningkat dari USD 1.249,51 miliar menjadi USD 1.433,63 miliar. Selain itu, belanja pada layanan IT juga menunjukkan peningkatan dari USD 1.717,59 miliar menjadi USD 1.866,86 miliar, sedangkan belanja pada layanan komunikasi diproyeksikan naik dari USD 1.303,65 miliar menjadi USD 1.365,18 miliar. Peningkatan belanja tersebut mencerminkan semakin tingginya kebutuhan terhadap infrastruktur digital, pengembangan perangkat lunak, serta layanan teknologi informasi guna mendukung transformasi digital yang terus berlangsung di berbagai sektor industri di dunia.

Seiring dengan meningkatnya belanja pada segmen perangkat lunak dan layanan teknologi informasi, layanan komputasi awan berkembang menjadi salah satu pilar utama yang mendorong transformasi digital di berbagai industri. Layanan komputasi awan memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara lebih efisien tanpa bergantung pada infrastruktur perangkat keras lokal, sehingga memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Pertumbuhan layanan ini juga didorong oleh meningkatnya kebutuhan kolaborasi digital lintas wilayah, pengolahan data dalam jumlah besar, serta tuntutan terhadap sistem penyimpanan yang lebih aman, andal, dan efisien dari sisi biaya. Oleh karena itu, perkembangan komputasi awan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung percepatan adopsi teknologi informasi di tingkat global.

Berdasarkan laporan dari Mordor Intelligence, ukuran pasar komputasi awan global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai pasar komputasi awan pada tahun 2025 mencapai sebesar USD 0,86 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD 1,04 triliun pada tahun 2026. Dalam jangka menengah, pasar komputasi awan diproyeksikan terus berkembang dengan CAGR sekitar 20,65% pada periode 2026 – 2031. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya transformasi digital, migrasi sistem perusahaan ke platform berbasis awan, penggunaan kecerdasan buatan, serta kebutuhan akan infrastruktur data yang fleksibel dan efisien di berbagai sektor industri. Secara regional, kawasan Asia Pasifik diperkirakan menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dan ekspansi pusat data di negara-negara berkembang.



Selain komputasi awan, perkembangan industri teknologi informasi juga didukung oleh pertumbuhan sektor *Business Process Outsourcing* (BPO) yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Berdasarkan laporan dari *Fortune Business Insights*, ukuran pasar *outsourcing* proses bisnis global bernilai sekitar USD 327,01 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat dari USD 353,64 miliar pada tahun 2026 menjadi USD 741,60 miliar pada tahun 2034, dengan CAGR sebesar 9,70% selama periode proyeksi dengan Amerika Utara tercatat sebagai wilayah dengan pangsa pasar terbesar. Pertumbuhan pasar ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk mengalihdayakan proses bisnis non-inti kepada penyedia layanan pihak ketiga, termasuk layanan pelanggan, keuangan, sumber daya manusia, dan layanan berbasis teknologi. Selain itu, adopsi model layanan berbasis komputasi awan, otomatisasi, serta penggunaan analitik data semakin mendorong perubahan model *outsourcing* tradisional yang berorientasi pada efisiensi biaya menjadi kemitraan strategis berbasis kinerja dan teknologi di berbagai sektor industri.

Data lain dari Statista juga menunjukkan bahwa pasar BPO global masih mengalami pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2026, pendapatan pasar BPO di seluruh dunia diproyeksikan mencapai sekitar USD 434,99 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi USD 491,15 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat CAGR sekitar 3,08%. Secara geografis, Amerika Serikat diperkirakan menjadi negara dengan pendapatan terbesar dalam pasar ini, sementara India tetap menjadi salah satu pusat utama industri *outsourcing* global karena didukung oleh ketersediaan tenaga kerja teknologi informasi yang besar dan kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan *outsourcing* masih menjadi bagian penting dalam ekosistem teknologi informasi global, terutama dalam mendukung efisiensi operasional dan transformasi digital di berbagai sektor industri.

Secara umum, industri teknologi informasi global menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan meningkatnya transformasi digital di berbagai sektor. Pertumbuhan belanja teknologi informasi, perkembangan komputasi awan, serta meningkatnya kebutuhan perangkat lunak dan layanan teknologi mencerminkan bahwa peran teknologi informasi semakin penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, kemajuan infrastruktur digital dan meningkatnya penggunaan data terus mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi secara global, sehingga sektor ini tetap menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi dunia.



III.B. Tinjauan Industri Teknologi Informasi di Indonesia

Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi serta meningkatkan produktivitas. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

Dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi digital yang erat kaitannya dengan pertumbuhan industri teknologi informasi, Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama melalui perluasan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas layanan internet, serta penguatan ekosistem digital nasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan digital tenaga kerja dan adopsi teknologi pada pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya tersebut turut didukung dengan pengembangan pusat data nasional serta penyempurnaan regulasi di sektor digital guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi pelaku industri teknologi informasi.

Seiring dengan upaya Pemerintah dalam mempercepat transformasi digital, ukuran pasar TIK di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan laporan dari IMARC Group, nilai pasar TIK Indonesia mencapai sekitar USD 50,20 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 169,30 miliar pada tahun 2034, dengan CAGR sebesar 14,45% pada periode 2026 – 2034. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kondisi perekonomian nasional yang terus berkembang, meningkatnya penetrasi internet, serta fokus Pemerintah dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Selain itu, kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang lebih modern, perkembangan industri *financial technology*, serta meningkatnya permintaan terhadap komputasi awan turut menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan pasar teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.



Pertumbuhan pasar teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia juga didukung oleh meningkatnya penggunaan *smartphone* dan semakin luasnya akses internet yang memperbesar basis pengguna layanan digital. Selain itu, berbagai kebijakan Pemerintah seperti pengembangan jaringan 5G dan percepatan digitalisasi di berbagai sektor turut mempercepat pertumbuhan industri ini. Perkembangan perdagangan elektronik yang pesat, meningkatnya adopsi komputasi awan, serta penerapan transformasi digital pada sektor perbankan, telekomunikasi, ritel, dan manufaktur menjadi faktor penting yang mendorong permintaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi. Di sisi lain, kebutuhan terhadap perlindungan data dan keamanan siber juga semakin meningkat, seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha maupun instansi pemerintah.

Selain pertumbuhan pasar TIK secara umum, sektor layanan teknologi informasi di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan laporan dari Mordor Intelligence, nilai pasar layanan teknologi informasi di Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar USD 4,76 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 5,41 miliar pada tahun 2026 dan diproyeksikan mencapai USD 9,52 miliar pada tahun 2031, dengan tingkat CAGR sebesar 11,97% pada periode 2026 – 2031. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya adopsi komputasi awan, kebutuhan terhadap penerapan kecerdasan buatan pada kegiatan operasional, serta pengembangan infrastruktur pusat data yang semakin luas. Sehubungan dengan kecerdasan teknologi dan komputasi awan, Indonesia juga mengalami peningkatan adopsi melalui *chatbot* dan *voicebot* guna mendukung operasional bisnis dengan menggabungkan satu *platform* yang sama.

Interaksi pelanggan melalui penyediaan respons yang cepat dan efisien didorong oleh kebutuhan akan layanan pelanggan yang hemat biaya, serta mampu beroperasi setiap saat. Selain itu, peningkatan adopsi teknologi digital, tingginya kebutuhan akan otomatisasi dalam layanan pelanggan, serta fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan turut memperkuat perkembangan *chatbot*. Dalam implementasinya, *chatbot* mampu memberikan dukungan berkelanjutan, meningkatkan interaksi pelanggan, memberikan respons cepat, serta menekan biaya operasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan, khususnya dalam menciptakan percakapan yang alami dan kontekstual dalam bahasa Indonesia serta dalam memberikan tanggapan yang akurat dan relevan.

Di sisi lain, perkembangan *Artificial Intelligence (AI)*, khususnya *conversational AI*, di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat yang didorong oleh kebutuhan akan interaksi pelanggan yang lebih personal serta layanan dukungan otomatis. Secara keseluruhan, penggunaan *chatbot* berbasis AI di Indonesia terus meningkat, seiring dengan pemanfaatan sebagai alat perusahaan untuk menangani lonjakan pertanyaan pelanggan atau *customer experience* serta mengotomatisasi layanan dan operasional bisnis. Hal ini mencerminkan tingginya adopsi teknologi di berbagai sektor serta meningkatnya kebutuhan akan interaksi pelanggan yang lebih personal dan proses layanan yang dilakukan secara otomatis.



Dalam perkembangannya, sektor BPO di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada layanan *customer experience outsourcing*. Berdasarkan laporan dari Grand View Research, pendapatan pasar *customer experience business process outsourcing* di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar USD 7.149,50 juta pada tahun 2033, dengan CAGR sebesar 14,80%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap layanan pengelolaan pelanggan yang lebih efisien, seiring dengan berkembangnya sektor *e-commerce*, perbankan digital, telekomunikasi, dan layanan berbasis teknologi. Selain itu, semakin luasnya pemanfaatan komputasi awan, otomatisasi, serta analitik data turut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan layanan *outsourcing* guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga efisiensi operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor BPO menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung perkembangan industri teknologi informasi di Indonesia.

Dengan segala inisiatif ini, industri IT Indonesia diharapkan dapat terus berkembang pesat, tidak hanya meningkatkan infrastruktur dan layanan digital, tetapi juga memperkuat perekonomian digital Indonesia dalam jangka panjang. Perkembangan tersebut akan semakin mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan di seluruh kawasan Indonesia.

III.C. Strategi Pemasaran

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perseroan telah merencanakan dan menetapkan beberapa strategi pemasaran. Adapun Strategi yang akan diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perseroan melalui unit bisnis *EnterpriseCo* menerapkan strategi pemasaran dengan memperluas penetrasi ke segmen proyek pemerintah, kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.
- Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dilakukan sebagai langkah strategis untuk memenuhi persyaratan administratif guna mengikuti tender dan pengadaan di sektor tersebut.
- Perseroan mengembangkan pendekatan pemasaran berbasis solusi terintegrasi (*bundling*), mencakup penyediaan *software* dan pengadaan perangkat dalam satu paket.
- Optimalisasi kanal distribusi dilakukan melalui partisipasi pada ekosistem pengadaan pemerintah seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perseroan juga menargetkan sektor pendidikan melalui platform SIPLAH untuk memanfaatkan peluang pengadaan berbasis dana Bantuan Operasional Sekolah.



Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, memperluas sumber pendapatan, serta mengoptimalkan peluang dari anggaran publik secara berkelanjutan.

III.D. Pesaing Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki beberapa pesaing usaha dengan perincian sebagai berikut:

- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
- PT Aplikanusa Lintasarta;
- PT Indonesia Comnets Plus; dan
- PT Supra Primatama Nusantara.



IV. ASPEK KELAYAKAN TEKNIS

IV.A. Gambaran Umum Wilayah Operasional PT Link Net Tbk

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyediaan jasa telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (penyedia jasa internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya dan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), juga untuk perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call center*. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan melalui entitas anaknya beroperasi di seluruh area jangkauan Perseroan dengan perwakilan EntCo di luar Jakarta yang meliputi medan, batam, bandung, jogja, semarang, solo, surabaya, dan denpasar.

IV.B. Proses Kegiatan Operasional PT Link Net Tbk

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat proses kegiatan operasional Perseroan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:





Dalam menjalankan kegiatan *e-procurement*, proses dimulai dari pihak Pemerintah sebagai pengguna yang mengunggah kebutuhan tender beserta *Bill of Quantity (BoQ)* dan spesifikasi ke dalam platform *e-procurement*. Selanjutnya, Perseroan melakukan persiapan kebutuhan serta pencarian vendor yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan proses pengiriman spesifikasi kepada vendor untuk memperoleh penawaran. Setelah itu, Perseroan melakukan evaluasi dan memilih vendor yang paling sesuai. Hasil pemilihan spesifikasi barang atau jasa dimasukkan ke dalam *e-catalog* dan akan diumumkan pemenang tender oleh pihak pemerintah melalui penerbitan *e-purchase order*. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan kemudian menerbitkan *purchase order* kepada vendor terpilih untuk pelaksanaan pengadaan. Vendor akan melakukan pengiriman barang atau jasa kepada Perseroan disertai dengan *delivery order* dan *invoice*.

Setelah barang atau jasa diterima, Perseroan akan melanjutkan pengiriman kepada pihak pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Pihak pemerintah kemudian melakukan proses penerimaan barang yang dibuktikan dengan penerbitan berita acara serah terima. Selanjutnya, vendor akan menyampaikan *invoice* kepada Perseroan dan Perseroan juga akan menyampaikan *invoice* kepada Pemerintah. Sebagai tahap akhir, pihak Pemerintah akan menerbitkan *payment order* kepada Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang disepakati, kemudian diikuti dengan pembayaran oleh Perseroan kepada vendor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian proses ini mencerminkan alur kegiatan usaha Perseroan dalam mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa melalui mekanisme *e-procurement*.

IV.C. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan jasa telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (penyedia jasa internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya dan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), juga untuk perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call center*. Perseroan memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung penambahan kegiatan usaha baik dari sisi finansial, infrastruktur, maupun teknologi. Dari sisi finansial, Perseroan senantiasa menyediakan posisi finansial yang cukup untuk mendukung penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dari sisi infrastruktur, perusahaan telah memiliki jaringan dan sistem yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan usaha baru.

Selain itu, kualitas sumber daya yang dimiliki juga memadai untuk mendukung kegiatan usaha, tercermin dari penggunaan teknologi yang relevan dan penerapan standar operasional yang sesuai dengan praktik industri. Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan pengembangan sistem guna memastikan keberlangsungan dan kualitas layanan yang disediakan kepada pelanggannya



Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah memiliki tenaga kerja ahli yang dibutuhkan untuk mendukung operasional atas kegiatan usaha tersebut. Perseroan juga berkomitmen untuk senantiasa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya, khususnya terkait dengan kegiatan usaha baru yang akan dijalankan.

Hingga saat ini, Perseroan telah mengalokasikan karyawan internal yang berpengalaman untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Mengingat bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut merupakan kegiatan usaha pendukung sesuai KBLI yang berlaku, Perseroan akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap kebutuhan tenaga kerja guna menunjang operasional. Dalam hal diperlukan, Perseroan akan melakukan penambahan tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan usaha.



V. ASPEK KELAYAKAN POLA BISNIS

V.A. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan jasa telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (penyedia jasa internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya dan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), juga untuk perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call center*, Perseroan mempunyai keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Pengalaman operasional dan pemahaman pasar yang kuat

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang didukung oleh pengalaman operasional yang panjang di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Dengan pengalaman yang telah terbangun selama puluhan tahun, Perseroan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pasar serta kebutuhan pelanggan, sehingga mampu merumuskan strategi bisnis yang adaptif dan tepat sasaran.

- Jaringan infrastruktur luas dan hubungan strategis

Perseroan didukung oleh jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terbangun secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki hubungan yang solid dengan mitra strategis dan pelanggan, yang menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan bisnis serta memperluas peluang kerja sama di masa mendatang.

- Kualitas layanan dan fleksibilitas pengembangan solusi

Perseroan memiliki keunggulan dalam penyediaan layanan yang berkualitas tinggi dengan tetap menjaga fleksibilitas dalam mengembangkan produk dan layanan. Kemampuan ini memungkinkan Perseroan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang secara dinamis.



V.B. Aktivitas Perseroan Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Setelah pelaksanaan rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan akan menjalankan aktivitas operasional yang terintegrasi dengan kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya, dengan tetap mengacu pada strategi bisnis dan rencana kerja Perseroan.

Perseroan akan melakukan pengembangan layanan dan/atau produk baru yang relevan dengan penambahan kegiatan usaha tersebut, termasuk optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya yang telah dimiliki. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan peningkatan kapasitas teknologi untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan usaha baru.

Perseroan juga akan memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor telekomunikasi, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap aspek operasionalnya.

Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan di industri, meningkatkan daya saing, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

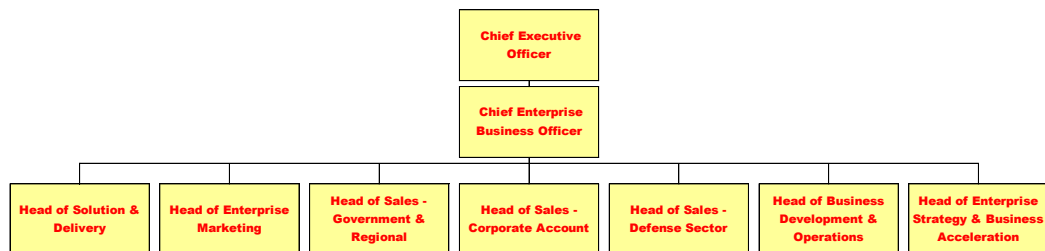


VI. ASPEK KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN

Sistem organisasi dan manajemen yang baik sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya suatu perusahaan yang sistematis dalam pengendalian internal sehingga dapat membentuk perusahaan yang stabil dan untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi dan manajemen yang baik sangat erat hubungannya dengan koordinasi kerja yang terpadu dan terarah.

Dalam setiap organisasi diperlukan ketegasan dalam pembagian tugas yang disesuaikan dengan bagan organisasi, pendelegasian wewenang yang jelas dan koordinasi kerja yang terpadu. Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pengalaman, keahlian, dan keterampilannya merupakan faktor yang penting dalam menerapkan kebijaksanaan perusahaan. Hal ini juga akan memperlancar pendelegasian tugas kepada unit di bawahnya atau sebaliknya, yang pada akhirnya akan memperlancar kerja perusahaan.

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:



VI.A. Kapasitas dan Kemampuan Manajemen

Perseroan memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam mengelola kegiatan usaha di sektor telekomunikasi. Susunan manajemen Perseroan terdiri dari individu-individu yang memiliki latar belakang profesional serta pemahaman yang baik terhadap aspek operasional, keuangan, dan regulasi. Selain itu, perusahaan telah memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang jelas, termasuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Perseroan juga memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan strategis, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dengan kapasitas tersebut, Perseroan mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha yang akan ditambahkan secara efektif.



VI.B. Ketersediaan Tenaga Kerja

Perseroan memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk mendukung operasional kegiatan usaha yang berjalan saat ini maupun rencana pengembangan usaha. Tenaga kerja yang dimiliki terdiri dari tenaga profesional dan teknis yang berpengalaman di bidangnya.

Untuk mendukung kegiatan usaha baru, perusahaan juga memiliki strategi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, baik melalui pengembangan internal maupun rekrutmen tenaga kerja baru sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan memiliki fleksibilitas dan kesiapan dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten guna mendukung pelaksanaan kegiatan usaha tambahan.

VI.C. Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dihadapi. Analisis risiko usaha terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Perubahan Teknologi

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada perkembangan teknologi yang semakin pesat. Untuk menanggapi hal tersebut, Perseroan berusaha untuk cepat beradaptasi dengan cara menyesuaikan teknologi yang digunakan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan layanan yang diberikan Perseroan menjadi kurang inovatif dan tidak adaptif sehingga kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya minat para pelanggan atau kekalahan perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan sejenis, yang selanjutnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai khususnya dalam merumuskan kebutuhan pelanggan, pemilihan teknologi yang tepat, pengembangan layanan dan pengoperasian dan pemeliharaan saat ini juga menjadi sumber daya yang sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pengelolaannya. Kelangkaan ketersediaan sumber daya juga dapat mempengaruhi keberlangsungan layanan seperti tingginya tingkat gangguan akibat kelangkaan tenaga ahli yang sulit didapat, keterlambatan pengembangan layanan yang berpengaruh pada tertundanya layanan ke pelanggan, atau lambatnya pelayanan yang diberikan.



3. Risiko Gangguan Infrastruktur

Kegiatan usaha Perseroan sangatlah bergantung pada infrastruktur pendukung seperti ketersediaan listrik dan jaringan kabel di daerah-daerah. Jaringan kabel tersebut dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, dan bencana alam. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Perseroan serta dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan dalam jangka panjang.

4. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan berada dalam kondisi persaingan yang ketat antar penyedia jasa layanan lainnya, pemilik, dan operator infrastruktur telekomunikasi dengan penawaran yang bersaing dengan keberadaan geografis yang kompetitif. Dalam kondisi persaingan usaha yang meningkat, Perseroan diharapkan dapat tetap meningkatkan keunggulan kompetitif di bidangnya seperti meningkatkan kualitas layanan, kecepatan transmisi data, stabilitas jaringan, dan tentunya harga atau model bisnis yang kompetitif. Persaingan yang ketat dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, hingga prospek Perseroan.

5. Risiko Bencana Alam

Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari ancaman bencana alam, seperti badai tropis, angin topan, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran baik karena faktor alam maupun human error, dan berbagai bencana lainnya yang dapat memberikan dampak secara material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

6. Risiko Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan tidak langsung yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang dapat berdampak pada menurunnya daya beli melalui tingkat suku bunga yang tinggi. Apabila kebijakan pemerintah tersebut diterapkan, dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional Perseroan.



VII. ASPEK KELAYAKAN KEUANGAN

VII.A. Proyeksi Perseroan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

VII.A.1. Proyeksi Keuangan

Perhitungan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan didasarkan pada proyeksi keuangan Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang diuji pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang diuji kelayakannya.

Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal pokok dalam proyeksi laporan keuangan yang digunakan dalam perhitungan studi kelayakan.

VII.A.1. Umum

- Tidak akan ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum, atau undang-undang yang akan memengaruhi Perseroan, industri, atau negara di mana Perseroan beroperasi.
- Tidak akan ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam proyeksi laporan keuangan yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan.
- Tidak akan ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- Tidak akan ada hambatan-hambatan yang berarti atas penawaran bahan baku, bahan-bahan lainnya, produk-produk, serta jasa-jasa yang dijual kepada Perseroan.



- Tidak akan ada perubahan yang material terhadap harga bahan baku, bahan-bahan lainnya, produk-produk, serta jasa-jasa yang dijual, beban tenaga kerja, beban pabrikasi, dan beban-beban lain seperti yang berlaku sekarang ini dan yang diproyeksikan.
- Tidak akan ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
- Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat oleh Perseroan atas kewajiban kontijen atau arbitase, ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak, atau aset lain yang belum dipenuhi.
- Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.
- Sesuai dengan sifat industri, manajemen Perseroan mempersiapkan proyeksi laporan keuangan untuk tahun 2026 sampai dengan 2030.

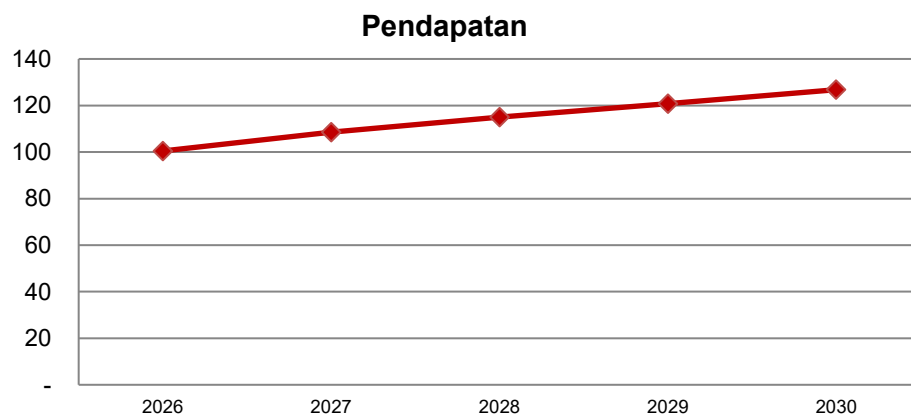
VII.A.2. Asumsi-asumsi yang Digunakan Dalam Perhitungan Studi Kelayakan

1. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan dalam penilaian ini terutama terdiri dari pendapatan perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar piranti lunak.

Grafik berikut menunjukkan proyeksi pendapatan Perseroan untuk tahun 2026 – 2030.

Grafik 2
PT Link Net Tbk
Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 – 2030
(Dalam miliar Rupiah)





2. Proyeksi Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan terutama terdiri dari pendapatan perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar piranti lunak. Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 diproyeksikan sebesar 71% – 74% dari pendapatan.

Grafik berikut menunjukkan proyeksi beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun 2026 – 2030.

Grafik 3
PT Link Net Tbk
Proyeksi Pokok Pedapatan Tahun 2026 – 2030
(Dalam miliar Rupiah)



3. Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar piranti lunak. Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 diprediksikan berkisar antara 17% – 18% dari pendapatan.

4. Pajak

Mengingat Perseroan adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, maka tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah tarif pajak yang berlaku umum di Indonesia, yaitu sebesar 22,00% untuk tahun 2026 – 2030.



5. Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif

Berdasarkan asumsi-asumsi untuk proyeksi laporan laba rugi komprehensif sebagaimana dijelaskan di atas, proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
PT Link Net Tbk
Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 - 2030

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Pendapatan	100.463	108.500	115.010	120.761	126.799
Beban pokok pendapatan	74.536	78.142	82.830	86.276	90.534
Laba kotor	25.928	30.359	32.180	34.485	36.265
Beban Usaha	17.694	18.579	19.508	20.483	21.507
Laba usaha	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	-	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Beban pajak	(1.811)	(2.592)	(2.788)	(3.080)	(3.247)
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511

Berdasarkan analisis tersebut di atas, proyeksi jumlah pendapatan dan laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha masing-masing adalah sebesar Rp 571,53 miliar dan Rp 47,93 miliar.

6. Kas dan Bank

Kas dan bank dipertahankan pada tingkat tertentu untuk menutupi kebutuhan operasi. Kelebihan kas yang timbul dari operasi akan tetap ditempatkan pada setara kas.

7. Piutang Usaha

Perputaran piutang usaha diasumsikan sekitar 30 hari selama periode proyeksi.

8. Persediaan

Perputaran persediaan diasumsikan sekitar 30 hari selama periode proyeksi.

9. Utang Usaha

Perputaran utang usaha diasumsikan sekitar 30 hari selama periode proyeksi.



10. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan asumsi-asumsi untuk proyeksi laporan posisi keuangan sebagaimana dijelaskan di atas, proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
PT Link Net Tbk
Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Per 31 Desember 2026 - 2030

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
A S E T					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	4.261	13.080	22.813	33.542	44.905
Piutang usaha	8.372	9.042	9.584	10.063	10.567
JUMLAH ASET	12.633	22.122	32.397	43.606	55.472

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang usaha	6.211	6.512	6.903	7.190	7.544
JUMLAH LIABILITAS	6.211	6.512	6.903	7.190	7.544
EKUITAS					
Saldo laba	6.422	15.610	25.495	36.416	47.927
JUMLAH EKUITAS	6.422	15.610	25.495	36.416	47.927
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	12.633	22.122	32.397	43.606	55.472

VII.B. Tingkat Diskonto

Untuk mendiskonto AKB untuk kapital, tingkat diskonto yang digunakan adalah biaya modal rata-rata tertimbang (*WACC/weighted average cost of capital*) yang ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$WACC = (k_e \times W_e) + (k_d [1-t] \times W_d)$$

Dimana:

- k_e = Biaya modal ekuitas/saham biasa
- k_d = Biaya modal utang
- W_e = Bobot ekuitas dalam struktur ekuitas
- W_d = Bobot utang dalam struktur kapital
- t = Pajak penghasilan perusahaan



VII.B.1. Biaya Modal untuk Ekuitas

Sebelum dapat menetapkan WACC, terlebih dahulu harus dihitung biaya modal ekuitas, yang ditentukan dengan *capital asset pricing model* (CAPM) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$k_e = R_f + (\beta \times RP_m) - RBDS$$

Dimana:

- k_e = Tingkat balikan yang diharapkan dari suatu sekuritas tertentu atau biaya modal ekuitas/saham biasa
- R_f = Tingkat balikan yang tersedia untuk suatu sekuritas bebas risiko (*risk free rate*)
- β = Beta
- RP_m = Premi risiko ekuitas untuk pasar secara keseluruhan (*equity risk premium*)
- α = *Alpha*

R_f adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang dianggap tidak memiliki kemungkinan gagal bayar. Di Indonesia, instrumen bebas risiko yang dapat dipilih adalah tingkat bunga Obligasi Pemerintah untuk jangka panjang. Terkait dengan tanggal penilaian yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2025, maka instrumen bebas risiko yang dipakai, yaitu obligasi Indonesia berjangka panjang dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu 10 tahun dengan tingkat *yield* rata-rata sebesar 6,17% yang diperoleh dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) dan angka tersebut akan digunakan sebagai tingkat balikan bebas resiko.

RP_m adalah selisih antara tingkat bunga investasi bebas risiko dengan tingkat balikan investasi dalam bentuk penyertaan. Penentuan *equity market risk premium* memasukkan premi untuk risiko spesifik negara (*country-specific risk premiums*) seperti volatilitas harga saham untuk menghasilkan *base equity market risk premium*. Dengan mengikutsertakan risiko-risiko ini, dihasilkan tingkat diskonto yang mengakomodasi perubahan-perubahan sentimen jangka pendek di sekuritas pada pasar negara yang bersangkutan. Untuk penilaian ini, kami menggunakan tingkat premi risiko sebesar 6,69%, yang diperoleh dari riset Aswath Damodaran (*New York University Business School*) tahun 2025 yang dikeluarkan pada bulan Januari 2026.

Beta (β) adalah faktor untuk meliputi risiko sistematis dari suatu ekuitas. Beta akan dikalikan dengan *market risk premium* untuk mendapatkan *equity risk premium*.



Unlevered beta rata-rata perusahaan pembanding diperoleh dari perusahaan publik sejenis, yaitu sebagai berikut:

- PT Multipolar Technology Tbk;
- PT Telefast Indonesia Tbk;
- PT Trimegah Karya Pratama Tbk;
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk;
- PT Data Sinergitama Jaya Tbk;
- PT Wir Asia Tbk;
- PT Sentral Mitra Informatika Tbk; dan
- VSTECS Berhad.

sebesar 0,92 yang kemudian di-relever dengan tingkat *leverage* yang berlaku di pasar untuk memperoleh beta yang sesuai untuk mendiskonto laba tahun berjalan Perseroan tersebut dengan formula sebagai berikut:

$$\beta_L = \beta_U \times (1 + (1-T) \times DER)$$

Dalam penilaian ini, kami menggunakan rata-rata *debt to equity ratio* (DER) dari perusahaan-perusahaan publik sejenis sebesar 0,48% untuk memperoleh beta Perseroan. Tarif pajak yang digunakan untuk Perseroan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku umum adalah sebesar 22,00% untuk tahun 2026 - 2030. Dengan demikian, maka diperoleh beta Perseroan sebesar 0,92 untuk tahun 2026 - 2030 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\beta_L = 0,92 \times (1 + (1 - 22,00\%) \times 0,48\%) = 0,92$$

Berdasarkan nilai beta tersebut, maka dengan menggunakan persamaan CAPM dengan memperhitungkan *rating-based default spread* sebesar 1,62%, diperoleh biaya modal atas ekuitas Perseroan sebagaimana tampak dalam perhitungan di bawah ini:

$$K_e = 6,17\% + 0,92 \times 6,69\% - 1,62\% = 10,72\%$$

VII.B.2. Biaya Modal untuk Utang

Karena perhitungan nilai ekuitas keseluruhan modal (AKB untuk kapital atau *free cash flow to invested capital*), maka tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat diskonto yang merupakan rata-rata tertimbang biaya modal, baik yang berasal dari pinjaman jangka panjang (biaya modal untuk utang) maupun yang berasal dari ekuitas (biaya modal untuk ekuitas).

Dalam penilaian ini, biaya modal untuk utang yang digunakan adalah suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah yang diambil dari suku bunga kredit investasi bank Persero untuk bulan Desember 2025 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia sebesar 8,44%.



VII.B.3. *Weighted Average Cost of Capital*

Berdasarkan biaya modal untuk ekuitas, biaya modal untuk utang, bobot ekuitas sebesar 99,52% dan bobot utang sebesar 0,48%, yang diolah dari data rata-rata DER dari perusahaan-perusahaan publik yang sejenis dengan tarif pajak yang berlaku untuk Perseroan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku umum adalah sebesar 22,00% untuk tahun 2026 – 2030 maka *weighted average cost of capital* (WACC) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} WACC &= (k_e \times W_e) + (k_d [1-t] \times W_d) \\ WACC &= (10,72\% \times 99,52\%) + (8,44\% \times [1 - 22,00\%] \times 0,48\%) = 10,70\% \end{aligned}$$

VII.B.4. Perhitungan Jumlah Nilai Kini Laba Tahun Berjalan

Dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 10,70% untuk tahun 2026 – 2030 perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 adalah sebesar Rp 36,60 miliar.

Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
PT Link Net Tbk
Proyeksi Nilai Kini Laba Tahun Berjalan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Per 31 Desember 2026 - 2030

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah)				
	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511
Faktor diskonto	0,9505	0,8587	0,7757	0,7007	0,6330
Nilai kini	6.104	7.890	7.667	7.653	7.287
Jumlah nilai kini	36.601				



VII.C Analisis Kelayakan

Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030:

Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Tabel 7
PT Link Net Tbk
Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 - 2030

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Pendapatan	100.463	108.500	115.010	120.761	126.799
Beban pokok pendapatan	74.536	78.142	82.830	86.276	90.534
Laba kotor	25.928	30.359	32.180	34.485	36.265
Beban Usaha	17.694	18.579	19.508	20.483	21.507
Laba usaha	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	-	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	8.233	11.780	12.672	14.002	14.758
Beban pajak	(1.811)	(2.592)	(2.788)	(3.080)	(3.247)
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511

Berdasarkan analisis tersebut di atas, proyeksi jumlah laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebesar Rp 47,93 miliar.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 10,70%.

Dengan demikian, Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba rugi tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
PT Link Net Tbk
Proyeksi Nilai Kini Laba Tahun Berjalan Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Per 31 Desember 2026 - 2030

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511
Faktor diskonto	0,9505	0,8587	0,7757	0,7007	0,6330
Nilai kini	6.104	7.890	7.667	7.653	7.287
Jumlah nilai kini	36.601				



VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan memengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.



Lampiran A

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Laba tahun berjalan	6.422	9.188	9.884	10.921	11.511
Faktor diskonto	0,9505	0,8587	0,7757	0,7007	0,6330
Nilai kini	6.104	7.890	7.667	7.653	7.287
Jumlah nilai kini	<u>36.601</u>				